

ABSTRAK

PERBEDAAN PENGGOLONGAN PENDUDUK DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS BERDASARKAN SURAT DIREKTORAT PENDAFTARAN TANAH DITJEN AGRARIA DEPDAGRI NOMOR : Dpt/12/63/12/69

Surat keterangan waris yang digunakan untuk peralihan hak atas tanah karena pewarisan di Indonesia dibuat oleh pihak/instansi yang berbeda. Perbedaan pembuatan sesuai dengan golongan penduduk ini berdasarkan Surat Direktorat Pendaftaran Tanah Ditjen Agraria Depdagri Nomor : Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 42 ayat (1) *juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c, meskipun dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Indonesia hanya mengenal 2 (dua) warga negara yaitu warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penerapan perbedaan penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris serta mengkaji Notaris dari segi wewenang dan perlindungannya sebagai pembuat surat keterangan waris untuk golongan Tionghoa.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang berasal dari bahan pustaka, data dari lapangan, dan wawancara untuk memperkuat data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh temuan bahwa : 1. Penerapan perbedaan penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris di Indonesia masih dijalankan meskipun sudah tidak sesuai lagi/bertentangan karena adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 2. Notaris berwenang membuat surat keterangan waris dengan dasar surat pernyataan dari ahli waris yang dibuat dengan akta notariil (otentik) sebagai perlindungan hukum bagi notaris apabila dikemudian hari terjadi sengketa.

Kata Kunci : Keterangan Waris, Penggolongan Penduduk, Notaris.

ABSTRACT

**THE DIFFERENCE IN THE POPULATION OF CLASS CERTIFICATE INHERITANCE
BASED ON THE LETTER OF DIRECTORATE LAND REGISTRATION
DIRECTORATE GENERAL AGRARIAN
DEPARTMENT OF DOMESTIC NUMBER :
Dpt /12/63/12/69**

The certificate of inheritance are used for transfer of rights over land due to inheritance in Indonesia made by party/different agencies. Difference-making in accordance with this population group by virtue of the Land Registry Directorate of Agricultural Affairs Department of Domestic Number : Dpt /12/63/12/69 on the Certificate of Heritage and Citizenship Proof conjunction with Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration Article 42 paragraph (1) in conjunction with Regulation of the Minister of Agriculture/Head of the National Land Agency No. 3 Year 1997 on the Implementation of Government Regulation No. 24 of 1997 the provisions of Article 111 paragraph (1) letter c, although in Article 26 paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 second amendment and Article 1 paragraph 1 of Law No. 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia, Indonesia only recognize 2 (two) citizens are Indonesian citizens and foreign nationals.

The purpose authors conducted this study was to examine and analyze the application of the classification of population differences in the manufacture of a certificate of inheritance as well as reviewing Notary in terms of authority and protection as the maker heir statement to the Chinese Group.

The method used is the juridical approach empirical, analytical, descriptive research specifications. Source of data used are primary data and secondary data derived from library materials, data from the field, and interviews to strengthen secondary data.

Based on the research results, it was found that the findings : 1. The application of the classification of population differences in the manufacture of a certificate of inheritance in Indonesia is still running even though it does not fit anymore/contradictory because of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and Act No. 12 of 2006 on citizenship of the Republic of Indonesia. 2. Notary authorized heir statement made on the basis of an affidavit made by the heirs of notarized deed (authentic) as the legal protection of the notary if there is a dispute in the future.

Keywords : *Description inheritance, Classification of Population, Notary.*